

## ABSTRAK

Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap pemberi hak tanggungan yang bukan debitur masih kurang perhatian dari kacamata hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Seyognyanya hukum itu mempunyai fungsi dan prinsip salah satunya adalah member kepastian hukum dan menjamin atas hak-hak warga negara salah satunya terkait penjaminan hak tanggungan.

Dalam penulisan tesis ini penulis merumuskan masalah dan tujuan dari penelitiannya adalah sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap pemberi hak tanggungan yang bukan debitur, *Kedua*, Bagaimana akibat hukum pidana terhadap jaminan hak tanggungan yang bukan debitur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Kemudian sumber data yang penulis pergunakan ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, dimana didalam data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian tesis ini penulis menyimpulkan bahwa pemberian hak tanggungan yang bukan debitur juga harus mendapatkan perlindungan hukum, kosekuensi hukum daripada kelalian perlindungan hukum ini akan mempunyai akibat dan dampak hukum baik secara perdata dan pidana, secara perdata maka akibat hukum dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi, sementara secara hukum pidana maka akan menimbulkan sanksi hukum yang jelas sesuai pasal 373, 378, 263, 264, 266 yang terdapat dalam KUHP.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum Pidana, dan Hak Tanggungan bukan debitur.*

## **ABSTRACT**

*Underwriting Rights pursuant to Article 1 Number 1 of Act Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights are collateral rights imposed on land rights as referred to in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. There is a guarantee of legal protection for dependents who are not debtors are still lacking attention from the perspective of law both in civil law and criminal law. The law should have functions and principles, one of which is to provide legal certainty and guarantee the rights of citizens, one of which is related to the guarantee of mortgage rights.*

*In writing this thesis the writer formulates the problem and the purpose of his research are as follows, First, how is the form of criminal law protection against the non-debtor, the Second Right, What is the consequence of criminal law on the guarantee of mortgage rights that are not debtors. The method used in this thesis research is using empirical legal research method with research specifications used as analytical descriptive. Then there are 2 (two) data sources that I use, namely primary data and secondary data, where in the secondary data there are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of this thesis study the authors conclude that the granting of mortgage rights that are not debtors must also get legal protection, legal consequences rather than legal protection will have legal consequences and impacts both civil and criminal, civil law can result in default, while By criminal law, there will be clear legal sanctions in accordance with articles 373, 378, 263, 264, 266 contained in the Criminal Code.*

*Keywords: Criminal Law Protection, and Underwriting Rights are not debtors*